

DEMOKRASI, IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN

LUKMAN HAKIM



PROGRAM STUDI SOSIOLOGI PEDESAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Demokrasi, Implementasi Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2026

Lukman Hakim
I3603211005

@Hak cipta milik IPB University

IPB University





@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

RINGKASAN

LUKMAN HAKIM. Demokrasi, Implementasi Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan. Dibimbing oleh LALA M. KOLOPAKING, SOFYAN SJAF dan RILUS A. KINSENG

Disertasi ini berangkat dari kenyataan bahwa demokrasi dan pembangunan belum optimal menghadirkan kesejahteraan bagi warga desa. Negara telah mendorong desentralisasi, partisipasi, dan penguatan kewenangan desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi penanda penting bagi otonomi desa dan demokrasi desa. Undang-undang ini membuka ruang partisipasi, memperluas kewenangan desa, dan memperkuat posisi desa dalam pembangunan. Perubahan kelembagaan ini tidak otomatis mengurangi ketimpangan. Dalam banyak konteks, ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik di desa justru tetap bertahan, bahkan meningkat dalam bentuk baru melalui penguasaan sumber daya, dominasi elite, dan distribusi manfaat pembangunan yang tidak merata.

Pada tingkat makro, Indonesia menghadapi stagnasi demokrasi, penguatan oligarki, dan dominasi pendekatan teknokratis dalam pembangunan. Pada tingkat mikro, desa menjadi arena penting untuk membaca bagaimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Warga desa hadir dalam ruang demokrasi elektoral seperti pemilu, pilkades, dan ruang deliberatif seperti Musdus, Musdes dan Musrenbangdes namun tidak semua warga memiliki pengaruh yang setara. Elite desa, jaringan patronase, dan praktik klientelisme masih dominan menentukan arah kebijakan dan distribusi manfaat pembangunan desa.

Disertasi ini bertolak dari beberapa perdebatan teoretis. Perdebatan pertama menyangkut hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Sebagian teori melihat demokrasi sebagai jalan menuju distribusi yang lebih adil. Sebagian teori lain menunjukkan bahwa demokrasi dapat berjalan bersama ketimpangan. Perdebatan kedua menyangkut pembangunan pedesaan. Sebagian pendekatan menekankan pentingnya data, partisipasi, dan perencanaan. Pendekatan lain mengkritik pembangunan teknokratis yang menjauh dari kebutuhan warga. Perdebatan ketiga menyangkut kemiskinan. Perspektif kultural menekankan faktor internal diri kelompok miskin. Perspektif struktural menekankan faktor struktural soal ketimpangan akses sumberdaya. Perspektif politik menekankan relasi kuasa, institusi, dan distribusi pengaruh dalam proses kebijakan.

Disertasi ini menggunakan empat pijakan teoritis, yaitu: teori demokrasi deliberatif, *democratic rural development*, tata kelola pemerintahan, dan kemiskinan multidimensional. Teori demokrasi deliberatif membantu membaca kualitas partisipasi, inklusivitas, dan pertukaran informasi dalam musyawarah desa. Perspektif pembangunan pedesaan demokratis membantu membaca hubungan antara data, partisipasi, dan ketepatsasaran program. Perspektif tata kelola membantu membaca fungsi institusi desa dalam menyalurkan atau menghambat manfaat pembangunan. Perspektif kemiskinan multidimensional dan politik-struktural membantu membaca kemiskinan sebagai hasil deprivasi material, eksklusi sosial, dan ketimpangan pengaruh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* sekuensial eksploratori. Tahap pertama memakai metode kualitatif. Tahap ini menggali dinamika demokrasi, pembangunan, tata kelola, dan kemiskinan desa. Penelitian

ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, sejarah desa, sejarah aktor, sejarah keluarga miskin. Tahap kedua memakai survei kuantitatif terhadap 289 responden berusia 17 tahun ke atas. Penelitian ini memakai Data Desa Presisi sebagai basis data utama. Lokasi penelitian mencakup Desa Gelaranyar di Kabupaten Cianjur, Desa Margahayu di Kabupaten Subang dan Desa Pantai Bahagia di Kabupaten Bekasi. Tiga desa ini mewakili konteks sosial, ekologis, dan kelembagaan yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi desa tidak bekerja secara linear. Demokrasi desa dapat mendorong kesejahteraan. Hal itu terjadi saat deliberasi berjalan inklusif, rasional, dan berbasis data. Demokrasi desa juga dapat gagal menghasilkan kesejahteraan. Kegagalan itu muncul saat elite mendominasi forum, politik transaksional menguat, dan akses warga miskin terhadap arena deliberatif melemah. Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi desa bersifat semu (*Pseudo Rural Democracy*). Demokrasi desa berlangsung unsur deliberatif dan prosedural yang dibayangkayangi unsur klientelistik, patronase dan *elite captured*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan. Basis data sebagai dasar perencanaan pembangunan, proses perencanaan pembangunan secara deliberatif melalui Musdes, Musdus dan Musrenbangdes, tidak cukup untuk mewujudkan kesejahteraan. Implementasi pembangunan desa memerlukan program yang tepat sasaran. Ketepatan sasaran program ini yang menjadi indikasi apakah proses pembangunan desa berlangsung secara demokratis. Penelitian ini menunjukkan program pembangunan sering tidak tepat sasaran akibat bias kepentingan elit desa, bahkan praktek manipulasi dokumen perencanaan pembangunan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pembangunan desa bersifat semu (*Pseudo Rural Development*).

Dalam konteks tersebut, desa memerlukan institusi yang mampu menerjemahkan aspirasi warga menjadi kebijakan. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan desa memegang peran penting. Disertasi ini menemukan tiga pola fungsi tata kelola. Pertama, tata kelola berfungsi sebagai *bridge*. Tata kelola menghubungkan demokrasi dan pembangunan dengan kesejahteraan. Kedua, tata kelola berfungsi sebagai *null mechanism*. Tata kelola hadir secara administratif, tetapi tidak mengubah kesejahteraan. Ketiga, tata kelola berfungsi sebagai *barrier*. Tata kelola justru menghambat distribusi manfaat pembangunan.

Hasil penelitian tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan pedesaan tidak cukup diukur melalui pendapatan. Penelitian ini mengiris ukuran *World Bank*, BPS, dan UU Fakir Miskin. Irisan itu menghasilkan enam kategori kemiskinan. Kategori itu meliputi miskin ekstrem, rentan miskin ekstrem, miskin non-moneter, miskin regional, rentan miskin regional, dan tidak miskin. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan pedesaan bersifat berlapis. Sebagian warga miskin mengalami deprivasi pendapatan. Sebagian warga lain mengalami deprivasi kebutuhan dasar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa warga miskin tetap aktif dalam partisipasi elektoral. Namun, warga miskin lebih rentan terhadap politik transaksional. Warga miskin juga lemah dalam mempengaruhi keputusan Musdus, Musdes, Musrenbangdes, dan pengawalan dokumen perencanaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan desa lebih dekat dengan persoalan struktural dan politik daripada kultural murni.

Secara akademik, disertasi ini menghasilkan sejumlah kontribusi penting. Pertama, disertasi ini membangun Indeks Demokrasi Desa (IDD) sebagai instrumen untuk mengukur kualitas demokrasi pada aras desa. Kebaruan ini penting karena pengukuran demokrasi selama ini lebih banyak berada pada aras supra-desa, terutama tingkat nasional dan provinsi. Desa sering hanya hadir sebagai objek kebijakan, bukan sebagai satuan analisis demokrasi yang diukur secara sistematis. Karena itu, IDD menjadi penting untuk menangkap kualitas demokrasi lokal secara lebih kontekstual, terukur, dan komparatif. Kedua, disertasi ini membangun Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKR) sebagai instrumen untuk mengukur kesejahteraan rakyat desa secara lebih kontekstual. IKR dalam penelitian ini dirancang untuk menangkap kesejahteraan rakyat pedesaan secara lebih utuh melalui pemenuhan hak-hak dasar warga. Ketiga, disertasi ini merumuskan peran mediasi tata kelola pemerintahan desa pada pengaruh demokrasi desa dan pembangunan desa terhadap kesejahteraan. Keempat, disertasi ini menghasilkan tipologi tata kelola desa sebagai *bridge*, *null*, dan *barrier*. Kelima, disertasi ini menunjukkan bahwa data dan partisipasi warga dalam praktik demokrasi elektoral desa maupun deliberatif tidak otomatis disertai otonomi pilihan dan pengaruh keputusan kebijakan. Keenam, disertasi ini membangun enam kategori kemiskinan pedesaan melalui irisan WB, BPS, dan UU Fakir Miskin. Ketujuh, disertasi ini menegaskan bahwa kemiskinan pedesaan merupakan kemiskinan politik-struktural. Dengan demikian, disertasi ini memperkaya sosiologi politik pembangunan pedesaan dan memperkuat pembacaan tentang desa sebagai arena pertarungan kuasa, distribusi sumber daya, dan reproduksi kemiskinan.

Novelty utama disertasi ini terletak pada perumusan bahwa dalam konteks Indonesia, Demokrasi Pancasila secara normatif tidak berhenti sebagai gagasan ideal, tetapi memiliki bentuk operasional pada aras pedesaan melalui *democratic rural development*, *sodality*, *Data Desa Presisi*, dan *proper governance*. Secara teoritik, keempat unsur tersebut seharusnya memungkinkan bekerjanya musyawarah, kebersamaan, daulat rakyat, demokrasi ekonomi, kedaulatan data, dan keadilan sosial dalam proses pembangunan desa. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa realitas pedesaan masih jauh dari cita-cita tersebut. Demokrasi desa yang berlangsung secara semu (*Pseudo Rural Democration*) cenderung melahirkan implementasi pembangunan desa yang juga semu (*Pseudo Rural Development*), sehingga pembangunan mengalami *lost target* dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan pedesaan. Pola ini menjelaskan mengapa otonomi desa yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa masih menyisakan kemiskinan, ketimpangan, dan belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: deliberatif, demokrasi desa, kemiskinan pedesaan, pembangunan desa, tatakelola desa

*@Hak cipta milik IPB University*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

SUMMARY

LUKMAN HAKIM. Democracy, Development Implementation and Rural Poverty Alleviation. Supervised by Lala M. Kolopaking, Sofyan Sjaf, and Rilus A. Kinseng.

This dissertation departs from the reality that democracy and development have not yet optimally generated welfare for rural citizens. The state has promoted decentralization, participation, and the strengthening of village authority. The enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages marked an important milestone for village autonomy and village democracy. This law opened participatory space, expanded village authority, and strengthened the position of villages in development. However, these institutional changes have not automatically reduced inequality. In many contexts, social, economic, and political inequalities in villages have persisted, and in some cases intensified in new forms through resource control, elite domination, and the uneven distribution of development benefits.

At the macro level, Indonesia faces democratic stagnation, the strengthening of oligarchy, and the dominance of technocratic approaches in development. At the micro level, the village becomes an important arena for understanding how power operates in everyday life. Rural citizens participate in electoral democratic spaces such as general elections and village head elections, as well as in deliberative spaces such as *Musdus*, *Musdes*, and *Musrenbangdes*, yet not all citizens possess equal influence. Village elites, patronage networks, and clientelist practices continue to shape policy direction and the distribution of village development benefits.

This dissertation is grounded in several theoretical debates. The first concerns the relationship between democracy and welfare. Some theories regard democracy as a path toward more equitable distribution, while others show that democracy may coexist with inequality. The second debate concerns rural development. Some approaches emphasize the importance of data, participation, and planning, while others criticize technocratic development for distancing itself from citizens' needs. The third debate concerns poverty. Cultural perspectives emphasize internal factors within poor groups, structural perspectives emphasize inequality in access to resources, and political perspectives emphasize power relations, institutions, and the distribution of influence in policy processes.

This dissertation employs four theoretical foundations: deliberative democracy theory, democratic rural development, village governance, and multidimensional poverty. Deliberative democracy theory helps explain the quality of participation, inclusiveness, and information exchange in village deliberation. The democratic rural development perspective helps explain the relationship between data, participation, and program targeting accuracy. The governance perspective helps explain the role of village institutions in channeling or obstructing development benefits. Meanwhile, multidimensional and political-structural poverty perspectives help explain poverty as the result of material deprivation, social exclusion, and unequal influence in policy processes.

This study uses an exploratory sequential mixed-methods approach. The first stage employs qualitative methods. This stage explores the dynamics of democracy, development, governance, and village poverty. It uses in-depth interviews, observation, village history, actor history, and poor family history. The second

stage employs a quantitative survey of 289 respondents aged 17 years and above. The study uses Precision Village Data (Data Desa Presisi) as its primary database. The research sites include Gelaranyar Village in Cianjur Regency, Margahayu Village in Subang Regency, and Pantai Bahagia Village in Bekasi Regency. These three villages represent different social, ecological, and institutional contexts.

The findings show that village democracy does not operate in a linear manner. Village democracy can promote welfare when deliberation is inclusive, rational, and data-based. However, village democracy can also fail to produce welfare. Such failure occurs when elites dominate forums, transactional politics intensify, and poor citizens' access to deliberative arenas weakens. These findings indicate that village democracy is pseudo in character (Pseudo Rural Democracy). Village democracy contains deliberative and procedural elements, yet remains overshadowed by clientelism, patronage, and elite capture.

The findings also show that village development does not automatically improve welfare. A database as the basis for development planning, as well as deliberative planning processes through *Musdes*, *Musdus*, and *Musrenbangdes*, are not sufficient to realize welfare. Village development implementation requires well-targeted programs. Program targeting accuracy is the key indicator of whether village development actually proceeds democratically. This study shows that development programs are often poorly targeted due to village elite bias, and even due to manipulation of village development planning documents. These findings indicate that village development implementation is likewise pseudo in character (Pseudo Rural Development).

In this context, villages require institutions capable of translating citizens' aspirations into policy. Here, village governance plays a crucial role. This dissertation identifies three patterns of governance function. First, governance functions as a bridge, connecting democracy and development to welfare. Second, governance functions as a null mechanism: it exists administratively but does not alter welfare outcomes. Third, governance functions as a barrier, actively obstructing the distribution of development benefits.

The findings on poverty show that rural poverty cannot be adequately measured through income alone. This study intersects measures from the World Bank, Statistics Indonesia (BPS), and the Law on the Handling of the Poor (UU Fakir Miskin). This intersection produces six poverty categories: extreme poor, vulnerable extreme poor, non-monetary poor, regional poor, vulnerable regional poor, and non-poor. These findings show that rural poverty is layered. Some poor citizens experience income deprivation, while others experience deprivation in basic services and social protection. This study also finds that poor citizens remain active in electoral participation. However, they are more vulnerable to transactional politics. Poor citizens are also weaker in influencing decisions in *Musdus*, *Musdes*, *Musrenbangdes*, and in monitoring planning documents. These findings indicate that village poverty is more closely related to structural and political problems than to purely cultural ones.

Academically, this dissertation offers several important contributions. First, it develops a Village Democracy Index (Indeks Demokrasi Desa/IDD) as an instrument to measure the quality of democracy at the village level. This is significant because measurements of democracy have so far largely been conducted at supra-village levels, especially at the national and provincial levels. Villages

have often appeared merely as policy objects, rather than as units of democratic analysis measured systematically. Thus, the IDD is important for capturing local democratic quality in a more contextual, measurable, and comparative manner. Second, this dissertation develops a People's Welfare Index (Indeks Kesejahteraan Rakyat/IKR) as an instrument to measure rural citizens' welfare more contextually. This innovation is important because welfare measurement has often relied on macro indicators or partial economic indicators. The IKR is designed to capture rural welfare more comprehensively through the fulfillment of citizens' basic rights. Third, this dissertation formulates the mediating role of village governance in the influence of village democracy and village development on welfare. Fourth, it produces a typology of village governance as bridge, null, and barrier. Fifth, it shows that data and citizen participation in both electoral and deliberative village democracy do not automatically entail autonomy of choice and influence over policy decisions. Sixth, it develops six categories of rural poverty through the intersection of World Bank, BPS, and UU Fakir Miskin measures. Seventh, it affirms that rural poverty is a form of political-structural poverty. In this way, the dissertation enriches the political sociology of rural development and strengthens the understanding of the village as an arena of power struggle, resource distribution, and the reproduction of both welfare and poverty.

The main novelty of this dissertation lies in the formulation that, in the Indonesian context, Pancasila Democracy normatively does not stop as an ideal idea, but has an operational form at the rural level through democratic rural development, sodality, Precision Village Data, and proper governance. Theoretically, these four elements should enable deliberation, togetherness, people's sovereignty, economic democracy, data sovereignty, and social justice to work within village development processes. However, the findings show that rural realities remain far from these ideals. Pseudo Rural Democratization tends to give rise to Pseudo Rural Development, causing development to miss its target in realizing people's welfare and rural poverty alleviation. This pattern explains why more than a decade of village autonomy has still left poverty, inequality, and an incomplete realization of people's welfare.

Keywords: deliberative, rural development, rural poverty, village democracy village governance



**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

© Hak Cipta Milik IPB, tahun 2026
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DEMOKRASI, IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN

LUKMAN HAKIM

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Doktor pada

Program Studi Sosiologi Pedesaan

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI PEDESAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Penguji Luar Komisi Pembimbing pada Ujian Tertutup Disertasi:

- 1 Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, SE, MS, DEA
- 2 Prof. Syarif Hidayat, PhD

Penguji Luar Komisi Pembimbing pada Ujian Terbuka Disertasi:

1. Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, SE, MS, DEA
2. Prof. (H.C). Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., CGRE

Judul Disertasi : Demokrasi, Implementasi Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan
Nama : Lukman Hakim
NIM : I3603211005

Disetujui oleh

Ketua Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS



Anggota Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt, M.Si



Anggota Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA

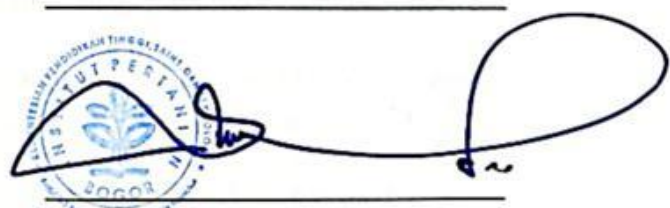


Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Dr. Ivanovich Agusta, S.P., M.Si
NIP. 197008161997021001



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia
Prof. Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt, M.Si
NIP. 197810032009121003



Tanggal Ujian Tertutup:
08 Juli 2026
Tanggal Sidang Promosi:
30 Juli 2026

Tanggal Lulus: 04 AUG 2026

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PRAKATA

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan disertasi dengan judul “Demokrasi, Implementasi Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan” sebagai syarat memperoleh gelar doktor pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia, Institut Petanian Bogor. Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan doa dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, M.S, Prof. Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt. M.Si dan Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA selaku komisi pembimbing yang sangat berdedikasi memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi;
2. Prof. Dr. Ir. Didin S. Damanhuri, S.E, M.S, DEA dan Prof. Syarif Hidayat, PhD sebagai penguji luar komisi ujian tertutup serta Prof. (H.C). Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., CGRE dan Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si atas masukan dan koreksi yang membangun untuk penyempurnaan naskah disertasi;
3. Dr. Ivanovich Agusta, S.P, M.Si dan Dr. Ratri Virianita, S.Sos, M.S selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Sosiologi Pedesaan yang telah memfasilitasi dan melayani proses penyelesaian studi penulis;
4. Prof. Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, MA selaku Sekertaris Program Studi Sosiologi Pedesaan periode sebelumnya, Prof. Dr. Megawati Simanjuntak, S.P., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISEMA sekaligus penguji ujian tertutup; Prof. Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan sekaligus penguji ujian terbuka, para dosen pengajar, tenaga kependidikan di lingkup Program Studi Sosiologi Pedesaan, Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Program Studi Sosiologi dan Dekanat FISEMA yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis selama berproses studi,
5. Para Kepala Desa Gelaranyar, Margahayu dan Pantai Bahagia serta perangkat desa yang telah membantu, memfasilitasi penulis selama penelitian dan penyelesaian disertasi,
6. Kolega Peneliti di Laboratorium Data Desa Presisi, Kebun Merdesa, teman satu Angkatan S3 Program Studi Sosiologi Pedesaan angkatan 2021 Mas Eko Cahyono dan Mbak Sriwulan Ferindian Falatehan yang senantiasa hadir menjadi teman berdiskusi yang konstruktif perihal isu pedesaan,
7. Bapak Dr. Ir. Reda Rizal, B.Sc., M.Si., IPU. ASEAN Eng, Ibu Lily Kuswiati, Ibu Ishartini dan alm. Bapak Eko Santoso sebagai orang tua yang senantiasa mendidik, mengarahkan, menasihati, menyemangati serta mendoakan penulis, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan doa, serta memberikan keteguhan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya,
8. Putri Eksanika, S. K.Pm., Sattar Shab Hakim dan Rumi Lunara Hakim atas dukungan, pengertian dan doa yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan disertasi ini.

Perjalanan pendidikan ini juga tidak terlepas dari prinsip yang sejak lama ditanamkan kepada penulis bahwa sekolah bukan sekadar jalan memperoleh gelar, tetapi ruang untuk mencari, mengembangkan, dan mengabdikan ilmu. Menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah serta bentuk rasa syukur atas akal yang dianugerahkan Allah SWT. Penulis juga selalu diingatkan bahwa tidak ada manusia yang jatuh miskin karena bersekolah. Pendidikan mungkin memerlukan biaya dan pengorbanan, tetapi ilmu memperkaya cara berpikir, menguatkan martabat, dan membuka jalan untuk memberi manfaat kepada sesama.

Besar harapan, disertasi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Penulis menyadari disertasi ini tidak sempurna dan banyak kekurangan. Dengan demikian, penulis mengharapkan masukan dan kritik untuk penyempurnaan penulisan.

Bogor, Agustus 2026

Lukman Hakim
I3603211005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Demokrasi Indonesia Masih Cacat	2
1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia	5
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kegunaan Penelitian	14
1.5 Kebaruan (<i>Novelty</i>)	14
II TINJAUAN TEORITIS	15
2.1 <i>State of The Art</i> : Menentukan Posisi dari Penelitian Terdahulu	15
2.2 Demokrasi Deliberatif dalam Ke-Indonesiaan	20
2.3 Demokrasi: Keterkaitan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi	23
2.4 Proses Demokrasi Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Pasca Reformasi)	25
2.5 Demokratisasi Desa (Orde Lama, Orde Baru dan Pasca Reformasi)	35
2.6 Oligarki dan Demokrasi	37
2.7 Ragam Pengukuran Demokrasi	40
2.8 Dinamika Implementasi Pembangunan Pedesaan	44
2.9 Sodality dan Pembangunan Pedesaan Demokratis	47
2.10 Tata Kelola Pemerintahan Desa	51
2.11 Penanggulangan Kemiskinan	53
2.12 Konsep Kemiskinan	58
2.12.1 Kemiskinan Kultural	59
2.12.2 Kemiskinan Struktural	59
2.12.3 Kemiskinan Politik	60
2.13 Kemiskinan Pedesaan	61
2.14 Ragam Pengukuran Kemiskinan	62
2.15 Kesejahteraan Rakyat	62
III KERANGKA PEMIKIRAN	65
3.1 Hipotesis Uji	69
3.2 Hipotesis Pengarah	69
IV METODOLOGI PENELITIAN	71
4.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	71
4.2 Lokasi Penelitian	74
4.3 Prosedur Pengumpulan Data	77
4.4 Tahapan Penelitian	80
4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas	82
4.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	83

4.6.1 Definisi Operasional Variabel	83
4.6.2 Indikator dan Pengukuran Indeks Demokrasi Desa	86
4.6.3 Indikator dan Pengukuran Indeks Kesejahteraan Rakyat	90
4.6.4 Indikator dan Pengukuran Implementasi Pembangunan Desa	93
4.6.5 Indikator dan Pengukuran Tata Kelola Pemerintahan Desa	94
4.6.6 Pengukuran Tingkat Kemiskinan Pedesaan	96
4.7 Analisis Korelasi Antarvariabel	97
4.8 Analisis Mediasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	98
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	101
5.1 Desa Gelaranyar	101
5.2 Desa Margahayu	103
5.3 Desa Pantai Bahagia	106
5.4 Karakteristik Responden	109
VI SOSIO-HISTORIS MASYARAKAT DESA GELARANYAR, MARGAHAYU DAN PANTAI BAHAGIA	111
6.1 Sosio-Historis Desa Gelaranyar	111
6.2 Sosio-Historis Desa Margahayu	117
6.3 Sosio-Historis Desa Pantai Bahagia	123
VII MENILAI DEMOKRASI DAN KESEJAHTERAAN DI PEDESAAN INDONESIA: ANALISIS KORELASI BERBASIS INDEKS	131
7.1 Pendahuluan	131
7.1.1 Kerangka Analisis	134
7.2 Hasil	136
7.2.1 Indeks Demokrasi Desa	136
7.2.2 Indeks Kesejahteraan Rakyat	139
7.2.3 Komparasi IDD dan IKR	143
7.2.4 Komparasi Capaian Pembangunan Desa	143
7.2.5 Korelasi Pengalaman Berdemokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat	144
7.3 Diskusi	152
7.4 Simpulan	155
VIII IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: ANALISIS KORELASI DI TIGA DESA PENGGUNA DATA DESA PRESISI	157
8.1 Pendahuluan	157
8.1.1 Kerangka Analisis	160
8.2 Hasil	161
8.2.1 Korelasi Implementasi Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Rakyat di Desa Gelaranyar	161
8.2.2 Korelasi Implementasi Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Rakyat di Desa Margahayu	162
8.2.3 Korelasi Implementasi Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Rakyat di Desa Pantai Bahagia	164
8.2.4 Data dan Partisipasi Tidak Selalu Berujung Kesejahteraan:	

	Komparasi antar Desa	166
8.3	Diskusi	168
8.4	Simpulan	171

IX	PERAN MEDIASI TATA KELOLA DESA DALAM MEMPERKUAT KESEJAHTERAAN DESA: STUDI KOMPARATIF TIGA DESA DI INDONESIA	173
9.1	Pendahuluan	173
9.2	Hasil	176
	9.2.1 Tata Kelola Pemerintahan Desa sebagai Jembatan Institusional Di Desa Gelaranyar	176
	9.2.2 Tata Kelola Pemerintahan Desa sebagai Mekanisme Netral Di Desa Margahayu	177
	9.2.3 Tata Kelola Pemerintahan Desa sebagai Penghambat Struktural Di Desa Pantai Bahagia	178
	9.2.4 Tipologi Peran Tata Kelola Pemerintahan Desa	180
9.3	Diskusi	183
9.4	Simpulan	185
X	MEMAHAMI KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL: PENDEKATAN MULTIDIMENSI TERHADAP KEMISKINAN PEDESAAN DI INDONESIA	187
10.1	Pendahuluan	187
10.2	Hasil	190
	10.2.1 Penerapan Pengukuran Kemiskinan <i>World Bank</i>	190
	10.2.2 Penerapan Pengukuran Kemiskinan BPS	191
	10.2.3 Indeks Keparahannya Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan	193
	10.2.4 Penerapan Pengukuran Kemiskinan Undang-undang Fakir Miskin (UUFM)	193
	10.2.5 Irisan Kemiskinan WB, BPS dan UUFM	194
	10.2.6 Distribusi Bantuan Sosial	197
10.3	Diskusi	200
10.4	Simpulan	201
XI	KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK-STRUKTURAL DALAM ARENA DEMOKRASI DESA	203
11.1	Pendahuluan	203
11.2	Hasil	205
	11.2.1 Kategorisasi Kemiskinan Pedesaan	205
	11.2.2 Politik Transaksional dan Kerentanan Ekonomi	207
	11.2.3 Partisipasi Elektoral: Tinggi tetapi Kurang Berkualitas	208
	11.2.4 Kepuasan terhadap Proses Demokrasi: Legitimasi Prosedural dan Batas Substansinya	210
	11.2.5 Akses terhadap Arena Deliberasi dan Pengambilan Keputusan	212
	11.2.6 Pengalaman Ancaman dan Kebebasan Sipil	214
	11.2.7 Keterlibatan dalam Tata Kelola Perencanaan	

Pembangunan Desa	215
11.3 Diskusi	217
11.4 Simpulan	218
XII PEMBAHASAN UMUM DAN SINTESIS	221
12.1 Demokrasi Desa dan Kesejahteraan Rakyat	221
12.2 Implementasi Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Rakyat	223
12.3 Tata Kelola Pemerintahan Desa sebagai Faktor Mediasi	227
12.4 Kemiskinan Multidimensional dan Distribusi Bantuan Sosial di Pedesaan	230
12.4.1 Kebijakan Afirmatif tanpa Demokrasi Subtatif: Kemiskinan dan Ekslusi Politik di Desa	233
12.5 Kemiskinan Politik-Struktural dalam Arena Demokrasi Desa	235
12.6 Sintesis Umum: Relasi Demokrasi Desa, Pembangunan, Tata Kelola dan Kesejahteraan Rakyat	238
XIIISIMPULAN UMUM DAN REKOMENDASI IMPLIKASI KEBIJAKAN	247
13.1 Simpulan Umum	247
13.2 Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi	249
DAFTAR PUSTAKA	253

DAFTAR TABEL

1	Ringkasan Penelitian tentang Demokrasi, Pembangunan Teknokratik dan Kemiskinan Pedesaan	15
2	Perbandingan Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Pancasila	22
3	Perbandingan Bentuk Demokrasi Indonesia dari Masa Orde Lama, Orde Baru dan Pasca Reformasi	28
4	Faktor Penyebab Kemunduran Demokrasi di Indonesia Kontemporer	30
5	Perbandingan Norma Yuridis tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Demokrasi Desa dari Era Orde Lama, Orde Baru dan Pasca Reformasi	33
6	Sumber Daya Oligarki dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa	36
7	Perbandingan Konseptualisasi Oligarki antara Winters dan Hadiz-Robinson	39
8	Perbandingan Konsepsi Demokrasi dan Ukurannya	41
9	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	42
10	Revitalisasi Arena, Dimensi dan Prinsip <i>Governance</i>	52
11	Strategi Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemerintah	54

12	Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Perodisasi Pemerintahan di Indonesia	55
13	Kebijakan/program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia	56
14	Ciri Dasar Desain Sekuensial Eksploratori	72
15	Daftar Informan	78
16	Sebaran Penduduk usia ≥ 17 tahun dan jumlah sampel di Desa Gelaranyar, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur	79
17	Sebaran Penduduk usia ≥ 17 tahun dan jumlah sampel di Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang	79
18	Sebaran Penduduk usia ≥ 17 tahun dan jumlah sampel di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi	80
19	Jumlah item pertanyaan berdasarkan variabel penelitian	82
20	Hasil uji reliabilitas item pertanyaan setiap variabel menggunakan <i>Cronbach's Alpha</i>	82
21	Keterangan pertanyaan tidak valid	83
22	Definisi Operasional	84
23	Perbandingan Indeks Demokrasi Desa dengan indeks demokrasi lainnya	87
24	Indikator, definisi operasional dan parameter Indeks Demokrasi Desa	88
25	Indikator, definisi operasional dan parameter Indeks Kesejahteraan Rakyat	91
26	Indikator, definisi operasional dan parameter implementasi Pembangunan desa	94
27	Indikator, definisi operasional dan parameter tata kelola pemerintahan desa	95
28	Sebaran sarana dan prasarana di Desa Gelaranyar	102
29	Sebaran sarana dan prasarana di Desa Margahayu	105
30	Sebaran sarana dan prasarana di Desa Pantai Bahagia	108
31	Daftar peristiwa dan dampak sosiologis masyarakat Desa Gelaranyar	115
32	Daftar peristiwa dan dampak sosiologis masyarakat Desa Margahayu	121
33	Daftar peristiwa dan dampak sosiologis masyarakat Desa Pantai Bahagia	127
34	Perbandingan skor dan kategorisasi Indeks Demokrasi Desa di Gelaranyar, Margahayu dan Pantai Bahagia	139
35	Perbandingan skor dan kategorisasi Indeks Kesejahteraan Rakyat Di Gelaranyar, Margahayu dan Pantai Bahagia	142
36	Komparasi Skor IDD dan IKR di Gelaranyar, Margahayu dan Pantai Bahagia	143



37	Capaian pembangunan desa berdasarkan Data Desa Presisi (DDP) Tahun 2025	144
38	Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024	144
39	Korelasi Pengalaman Berdemokrasi dan Kesejahteraan Rakyat di Desa Gelaranyar	145
40	Korelasi Pengalaman Berdemokrasi dan Kesejahteraan Rakyat di Desa Margahayu	148
41	Korelasi Pengalaman Berdemokrasi dan Kesejahteraan Rakyat di Desa Pantai Bahagia	150
42	Korelasi Implementasi Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Rakyat Di Desa Gelaranyar	161
43	Korelasi Implementasi Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Rakyat Di Desa Margahayu	163
44	Korelasi Implementasi Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Rakyat Di Desa Pantai Bahagia	165
45	Regresi berjenjang dengan <i>bootstrapping</i> untuk uji mediasi tatakelola pemerintahan Desa Gelaranyar	176
46	Regresi berjenjang dengan <i>bootstrapping</i> untuk uji mediasi tatakelola pemerintahan Desa Margahayu	178
47	Regresi berjenjang dengan <i>bootstrapping</i> untuk uji mediasi tatakelola pemerintahan Desa Pantai Bahagia	179
48	Komparasi peran mediasi tatakelola pemerintahan desa pada hubungan demokrasi desa dan kesejahteraan rakyat	181
49	Komparasi peran mediasi tatakelola pemerintahan desa pada hubungan Implementasi pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat	182
50	Tipologi peran tatakelola pemerintahan desa	182
51	Jumlah dan persentase penduduk miskin berdasarkan pengukuran kemiskinan <i>World Bank</i>	191
52	Jumlah dan persentase penduduk miskin berdasarkan pengukuran kemiskinan BPS	192
53	Indeks Keparahana Kemiskinan (PSI) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (PGI) berdasarkan garis kemiskinan <i>World Bank</i> dan BPS	193
54	Jumlah dan persentase penduduk miskin berdasarkan pengukuran kemiskinan UUFM	194
55	Jumlah penduduk miskin menurut WB, BPS dan UUFM	195
56	Kategorisasi kemiskinan dari irisan kemiskinan WB, BPS dan UUFM	197
57	Jumlah dan persentase individu berdasarkan kategorisasi kemiskinan dan aksesibilitas bantuan sosial	199
58	Jumlah penduduk berdasarkan kategorisasi kemiskinan hasil irisan	

@Hak Cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

	garis kemiskinan WB, BPS dan UUFM	207
59	Jumlah dan persentase kategori kemiskinan berdasarkan frekuensi penerimaan imbalan uang dalam pemilihan kepala desa	207
60	Jumlah dan persentase kategori kemiskinan berdasarkan frekuensi penerimaan imbalan sembako (bukan uang) dalam pemilihan kepala desa	208
61	Jumlah dan persentase kategori kemiskinan berdasarkan penggunaan hak suara dalam Pemilihan Presiden 2024	209
62	Jumlah dan persentase kategori kemiskinan berdasarkan penggunaan hak suara dalam pemilihan kepala desa	210
63	Jumlah dan persentase kategori kemiskinan berdasarkan tingkat kepuasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024	211
64	Jumlah dan persentase kategori kemiskinan berdasarkan tingkat kepuasan pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa	211
65	Tingkat kepuasan atas kesempatan berpartisipasi dalam diskusi public menurut kategori kemiskinan	212
66	Distribusi pengaruh substatif (<i>perceived political voice</i>) menurut kategori kemiskinan	213
67	Frekuensi undangan menghadiri diskusi publik desa menurut kategori kemiskinan	213
68	Jumlah dan persentase kategori kemiskinan berdasarkan pengalaman ancaman kekerasan yang menghambat kebebasan berpendapat	214
69	Partisipasi dalam Musyawarah Dusun (Musdus) berdasarkan kategori kemiskinan	216
70	Partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berdasarkan kategori kemiskinan	216
71	Partisipasi pengawasan dokumen perencanaan pembangunan desa berdasarkan kategori kemiskinan	217
72	Komparatif Tiga Desa berdasarkan Demokrasi Desa, Implementasi Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan	238

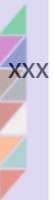
DAFTAR GAMBAR

1	Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2010 sampai 2024	3
2	Perbandingan Persentase Kemiskinan wilayah Perkotaan dan Perdesaan Indonesia tahun 2019-2025	8
3	Rasio Gini dan Persentase Kemiskinan di Pedesaan Indonesia tahun 2005-2023	9

4	Pola keterhubungan demokrasi politik dan ekonomi	24
5	Capaian Indeks Demokrasi Multidimensional Indonesia Tahun 1945-2021	29
6	Perbandingan Capaian Demokrasi Multidimensional di Indonesia tahun 1998 dan tahun 2000	31
7	Perbandingan Capaian Demokrasi Multidimensional di Indonesia tahun 2000 dan tahun 2022	31
8	Kerangka Mewujudkan Demokrasi Pancasila dengan Mendorong Demokrasi Pembangunan Pedesaan	46
9	Keterkaitan RPJMDes dengan RPKMD Kabupaten	49
10	Kerangka pemikiran struktur tentang sodality dalam perancangan pembangunan desa	50
11	Belanja Bantuan Sosial (Triliun Rupiah) tahun 2014-2024	57
12	Teori Kemiskinan Perilaku (Kultural)	59
13	Teori Kemiskinan Struktural	60
14	Teori Kemiskinan Politik	60
15	Kerangka Penelitian	68
16	Desain Sekuensial Eksploratori	72
17	Bagan Alur Prosedur-prosedur Dasar Penerapan Desain Eksploratori	73
18	Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2014-2022	75
19	Peta Sebaran Suara Pilgub Jawa Barat tahun 2018	76
20	Indeks Gini Desa Gelaranyar, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur	76
21	Indeks Gini Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang	77
22	Indeks Gini Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi	77
23	Skema Kerja Penelitian (Sekuensial Eksploratori)	81
24	Orthophoto Desa Gelaranyar	101
25	Orthophoto Desa Margahayu	104
26	Orthophoto Desa Pantai Bahagia	107
27	Karakteristik responden di Desa Gelaranyar, Margahayu dan Pantai Bahagia	109
28	Kerangka analisis hubungan antara demokrasi desa dan kesejahteraan rakyat	135
29	Capaian skor indikator Indeks Demokrasi Desa di Gelaranyar, Margahayu dan Pantai Bahagia	136

30	Capaian skor indikator Indeks Kesejahteraan Rakyat di Gelaranyar, Margahayu dan Pantai Bahagia	140
31	Kerangka analisis hubungan implementasi pembangunan desa dan kesejahteraan Rakyat dalam kerangka <i>Democratic Rural Development</i>	160
32	Kerangka konsep implementasi pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat dalam kerangka <i>Democratic Rural Development</i>	170
33	Diagram venn kemiskinan WB, BPS dan UUFM	195
34	Jumlah Penduduk Miskin menurut WB, BPS dan UUFM	206





@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University